



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 170/SK-25/DPRD/11/2023

NOMOR: 23/SKB/HK/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.267/HK-PERUU/IX/2023 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kedalam Propemperda 2024 dan Laporan Bapemperda terkait Propemperda Tahun 2024;
- b. bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke 17 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 November 2023 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Keputusan Bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Lampiran Persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KEEMPAT : Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

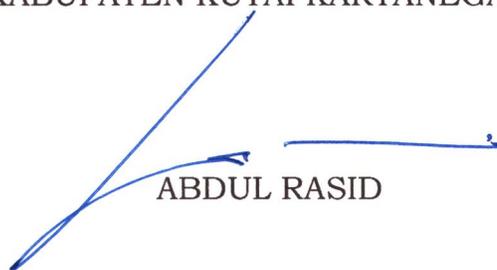
Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 27 November 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAI KARTANEGARA DAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NOMOR : 170/SK-25/DPRD/11/2023

NOMOR : 23/SKB/HK/2023

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2023

NO	JUDUL	MATERI	SIFAT BARU/ UBAH/ CABUT	TAHUN PENYEMPAAIAN KE DPRD	TAHUN PELAKSANAAN	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045	PENYESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN	UBAH	2023	2024	BUPATI/ BAPPEDA	-
2.	KERJASAMA DAERAH	PENGATURAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH/LUAR NEGERI/PIHAK KETTGA/SWASTA/ PENDIDIKAN	BARU	2023	2024	BUPATI/ BAGIAN KERJASAMA SETKAB KUKAR	-
3.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	PENYESUAIAN UU 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	UBAH	2023	2024	DPRD/ BAPEMPERDA	LUNCURAN TAHUN 2023
4.	PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN	PEMBANGUNAN KAWASAN DESA YANG LEBIH INKLUSIF DAN MEMILIKI AKUNTABILITAS SOSIAL	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI 1	LUNCURAN TAHUN 2023

		DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN DESA YANG KUAT, DEMORATIS DAN PARTISIPATIF SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MELALUI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DESA, PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL, SERTA SINERGITAS DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH					
5.	SISTEM KESEHATAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA	PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.	BARU	2023	2024	BUPATI/ DINKES	MENCABUT PERDA KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG SISTIM KESEHATAN DAERAH
6.	PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR	PEMBERDAYAAN PEDAGANG KECIL,	BARU	2023	2024	BUPATI/	MENCABUT PERDA KUTAI

	RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR, DUKUNGAN KEBERSIHAN DAN KEAMANAN, LARANGAN MONOPOLI, PENGAWASAN DAN PENECAK, DIVERSIFIKASI PRODUK, PASAR BERSIH DAN RAMAH LINGKUNGAN, KEAMANAN KONSUMEN				BAGIAN EKONOMI SETKAB KUKAR	KARTANEGERA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.
7.	PERUBAHAN PERDA NO 14 TAHUN 2014 TENTANG CAGAR BUDAYA KUTAI KARTANEGERA	PENYUSUNAN KRITERIA PENETAPAN CAGAR BUDAYA, PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN BUDAYA, KONSERVASI LINGKUNGAN	UBAH	2023	2024	DPRD / KOMISI IV	-
8.	PENATAGUNAAN LAHAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA	PENGUSAHAAN PEMBERIAN LAHAN OLEH PERUSAHAAN KEDAPA KELOMPOK MASYARAKAT, MELALUI KEMENTRIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN PENATAGUNAAN LAHAKN REKLAMASI PASCA TAMBANG	BARU	2022	2024	DPRD / BAPEMPERDA	LUNCURAN TAHUN 2023
9.	PERLINDUNGAN HABITAT PESUT MAHAKAM	UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN	BARU	2023	2024	DPRD /BUPATI PERSANDINGAN	LUNCURAN TAHUN 2023 PERUBAHAN NA DAN RAPAERDA

		TERHADAP HABITAT PESUT MAHAKAM					
10.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERSEROAN TERBATAS GRHA 165 Tbk	PENYESUAIAN BAB III PASAL 3 TERHADAP PEMENUHAN MODAL DAN KETENTUAN YANG MENGATUR KEUNTUNGAN DIVIDEN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	UBAH	2023	2024	DPRD/BUPATI PERSANDINGAN	-
11.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN	MENDORONG PERUSAHAAN UNTUK BERPERAN SERTA AKTIF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN PADA WILAYAH KERJA PERUSAHAAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN LINGKUNGAN YANG BERMANFAAT, BAIK BAGI PERUSAHAAN, KOMUNITAS SETEMPAT, MAUPUN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA.	UBAH	2023	2024	DPRD/ KOMISI IV	-
12.	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KUTAI KARTANEGARA	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN	BARU	2023	2024	DPRD/ BAPEMPERDA	-

		PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAGANAN KONFLIK SOSIAL DIATUR DALAM PERDA.						
13.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KUTAI KARTANEGARA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, KUALITAS LAYANAN WISATA, PEMASARAN DAN PROMOSI, KEMITRAAN PUBLIK-SWASTA, PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA	BARU	2023	2024	BUPATI/ DINAS PARIWISATA	-	
14.	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (RP3KP)	PASAL 15 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	BARU	2023	2024	BUPATI/ DINAS PERKIM	-	
15.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN	PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	UBAH	2023	2024	BUPATI/ DINAS PERIKANAN	LUNCURAN TAHUN 2023	
16.	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH KUTAI KARTANEGARA	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9, 12, 30, 53a, 90 PERATURAN PEMERINTAH PENGANGKUTAN UNDANG-UNDANG	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI II	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	

		NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA					MENENGAH KUTAI KARTANEGARA
17.	PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		BARU	2023	2024	DPRD/ BAPEMPERDA	PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
18.	PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA	PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA YANG AKAN DIATUR MERUPAKAN PANDUAN ATAU PEDOMAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI TINGKAT DESA. PRODUK HUKUM DESA INI MENCAKUP PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN PRODUK HUKUM DESA LAINNYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGATUR KEHIDUPAN MASYARAKAT DI TINGKAT DESA.	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI I	
19.	KAWASAN TANPA ROKOK	PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 52 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012	BARU	2023	2024	BUPATI/DINKES	-

		<p>PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU. PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 6 PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188/MENKES/PB/1/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.</p>						
20.	<p>PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM</p>	<p>DALAM RANGKA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA MELELUI PELAYANAN AIR MINUM YANG LEBIH BAIK SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DAN PENATAAN DEPO AIR MINUNG DI KUTAI KARTANEGARA</p>	BARU	2023	2024	BUPATI/DINKES	-	
21.	<p>KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA</p>	<p>PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN</p>	BARU	2023	2024	DPRD/ BAPEMPERDA	-	

		MENGHORMATI, MEMENUHI, MELINDUNGI, MENEGAKKAN, DAN MEMAJUKAN HAM.					
22.	PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA MERUPAKAN PENGATURAN YANG AKAN DITUJUKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DAN JATI DIRI MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA AGAR DAPAT MENCIPTAKAN RASA KEBERSAMAAN DAN SOLIDARITAS DI ANTARA ANGGOTA KOMUNITAS	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI II	-
23.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	PELAKSANAAN KETENTUAN PERETAUAN MENTRI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG SEKAT BAKAR	BARU	2023	2024	BUPATI/BPBD	-
24.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	PENGATURAN TERKAIT DENGAN MEKANISME PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.	UBAH	2023	2024	BUPATI/ DINAS PERTANIAN	-
25.	PENYELENGGARA PERIZINAN BERSAHABERBASIS RESIKO	PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI II	-

	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO.						
26.	PERUBAHAN ATAS PERDA KAB KUKAR NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN MENJADI PT TUNGGANG PARANGAN PERSERODA	RENCANA PEMINDAHAN ASET YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KEDALAM OTORITA IKN DALAM BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN ASET	UBAH	2023	2024	DPRD/ BAPEMPERDA	-	
27.	PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH	PENINGKATAN PERAN PENGENDALIAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH, PERLU DILAKUKAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH.	BARU	2023	2024	BUPATI/ BRIDA	-	
28.	PERIKANAN AIR TAWAR BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	PERAIRAN AIR TAWAR DAN LAHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN MENGANDUNG POTENSI SUMBERDAYA YANG TINGGI, SEHINGGA	BARU	2023	2024	DPRD/ KOMISI III		

		DENGAN MEMPERHATIKAN DAYA DUKUNG YANG ADA DAN KELESTARIANNYA DAPAT DIMANPAATKAN BAGI KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
29.	PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2023	ANGGARAN	BARU	2023	2024	BUPATI	-
30.	APBD-P TAHUN 2024	ANGGARAN	BARU	2023	2024	BUPATI	-
31.	APBD TAHUN 2025	ANGGARAN	BARU	2023	2024	BUPATI	-

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KUTAI KARTANEGARA**

ABDUL RASID